

Kesesuaian Kurikulum SMK Pertanian Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja (Fokus: Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian)

Subijanto, Darmawan Sumantri

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan-Jakarta Pusat, Indonesia

E-mail: subijanto2012@gmail.com

Abstract. This study aims to identify the link and match between the skills and competency of the Agricultural Vocational Secondary School graduates from the Agribusiness of Agricultural Product Processing Competency Skill and the competencies that the industry needs, and identify the mechanism in ensuring the link and match of the Agricultural Vocational Secondary School curriculum of the specific competency. The data was collected through a focus group discussion. The study results showed that the Agricultural Vocational Secondary School Curriculum has linked and matched with the competencies that the industry needs, referring to the certification for level two of the Indonesian National Qualification Framework. There is no formal steps and mechanism to link and match the curriculum of Agricultural Vocational Secondary School in the Competency Skill for Agribusiness of Agricultural Product Processing with the competencies that the industry needs. This study concluded that the curriculum of the Agricultural Secondary Vocational School focuses on The Competency Skill for Agribusiness of Agricultural Product Processing has linked and matched with the Certification Schema for Level Two of the Indonesian National Qualification Framework, set by the National Board for Professional Certification and the Directorate General for Primary and Secondary Education.

Keywords: Agricultural Curriculum, Competency Skill for Agribusiness, Agricultural Product Processing, Industry, Vocational Secondary School

PENDAHULUAN

Bidang Agribisnis/Agroteknologi merupakan salah satu dari empat program prioritas program kerja Kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Nawacita ke-6). Program dimaksud meliputi bidang peternakan, perikanan dan kehutanan, termasuk yang berkaitan dengan bisnis dan teknologi. memberi peluang kerja bagi lulusan SMK Pertanian, namun kebutuhan akan tenaga tersebut dari tahun ke tahun belum terpenuhi. Timbul asumsi bahwa salah satu penyebab utamanya yaitu kompetensi lulusan SMK bidang tersebut belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo berulang kali menyampaikan pesan agar Pemerintah lebih memfokuskan pada penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat melakukan lompatan kemajuan dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Fasli Jalal (2015). memperkirakan pada tahun 2040 Indonesia akan memiliki 195 juta penduduk usia produktif dan 60 persen dari penduduk usia muda di tahun 2045. Indonesia akan memiliki “*bonus demografi*” untuk mewujudkan “Indonesia Emas” bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada 11 Menteri Kabinet Kerja, 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing (Inpres. Nomor 9 Tahun 2016). Khusus kepada Mendikbud, Presiden memberikan enam instruksi, satu diantaranya adalah menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan. Khusus kepada Mendikbud, Presiden

Jokowi memberikan enam instruksi, salah satu instruksi tersebut yaitu menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*).

Presiden menambahkan “Kita harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi sebuah tenaga kerja yang terdidik dan terampil”. Salah satu cara untuk menghasilkan calon tenaga kerja yang berdaya saing dan kompeten yaitu dihasilkan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DU/DI).

Kondisi tersebut didukung oleh data BPS (2013a dan 2013b) yang menunjukkan proporsi pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa SMK mencapai angka tertinggi yaitu 12,7 persen. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menginstruksikan perombakan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dan Pemerintah harus melakukan reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah *demand driven*.

Mendikbud Muhajir Effendi (2016) optimis dan menegaskan bahwa “Kita memfokuskan pendidikan kejuruan yang berbasis kompetensi keahlian dan memiliki *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia usaha maupun industri DU/DI”. Hal ini perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja, di samping untuk mengurangi angka pengangguran”. “Kita yakin, pendidikan vokasi di SMK mampu menciptakan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan DU/DI” (SMK Bisa Hebat, edisi ke-II 2016).

Ironisnya, fakta empirik menunjukkan bahwa pola penyelenggaraan SMK di Indonesia belum beranjak dari *supply driven* ke *supply demand*. Hal ini menurut Ace Suryadi (2010) disebabkan karena jenis program keahlian, materi pendidikan, cara mengajar, media pembelajaran, evaluasi dan sertifikasi lebih dominan ditentukan oleh Pemerintah. Selain itu, program pendidikan SMK tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja.

Menyadari pentingnya pengembangn iptek dan kebutuhan tenaga kerja terampil, di negara-negara kawasan ASEAN menempatkan pendidikan kejuruan sebagai salah satu sumber pendukung utama pembangunan ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Proses integrasi ASEAN dan institusinya mendukung untuk saling berbagi pengetahuan, penyelarasan sistem pendidikan melalui negosiasi atas persamaan pengakuan, dan membuka peluang bagi pasar tenaga kerja yang lebih terbuka.

Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijak dan sigap, mengingat hanya dengan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil yang akan mampu bertahan dan bersaing dengan tenaga kerja dari negara manapun. Untuk itu, menjadi penting manakala sistem pendidikan vokasi (SMK) di Indonesia dapat mengembangkan berbagai strategi agar lulusannya berkualitas dan berkompentensi sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan (*stake holders*) pada skala global (Dir. PSMK, 2016a).

Dalam upaya meningkatkan kualitas lulusan SMK, filosofi keterkaitan dan kesesuaian” (*link and match*) pendidikan kejuruan “sangat relevan untuk mewujudkan kesesuaian antara kompetensi lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan DUDI. Namun, hal tersebut masih menjadi permasalahan tersendiri bagi pendidikan vokasi di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintahan Joko Widodo dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 (Kem.Sekneg. 2016)

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan hingga saat ini masih mengalami bergagai tantangan. Menurut hasil penelitian Slamet (2013) tentang penyelenggaraan SMK menunjukkan adanya kecenderungan 1) belum optimalnya keselarasan antara kompetensi lulusan dengan dunia kerja; 2) lemahnya SMK dalam menyiapkan lulusannya untuk menjadi wirausahawan; 3) belum mampunya SMK memberikan jaminan terhadap lulusannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak; 4) lambatnya daya

tanggap SMK terhadap dinamika tuntutan pembangunan ekonomi; dan 5) penyelenggaraan pendidikan kejuruan berfungsi tunggal, yaitu menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai karyawan.

Menurut Dir.PSMK (2016a), penyelenggaraan proses pembelajaran SMK memang masih mengalami permasalahan utama, antara lain 1) belum semua kompetensi keahlian yang dibuka di SMK sesuai dengan kebutuhan industri atau kebutuhan masyarakat di sekitarnya; dan 2) tingkat kompetensi lulusan belum semuanya sesuai standar yang dibutuhkan industri.

Mengacu pada berbagai permasalahan tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitian ini yaitu 1) Kompetensi keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) Kurikulum 2013 SMK Pertanian seperti apa yang dibutuhkan dunia kerja?, dan 2) Bagaimana mekanisme penyesuaian kurikulum 2013 SMK Pertanian kompetensi keahlian APHP agar kompetensi lulusannya sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja.

Atas dasar pertanyaan penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk 1) mengkaji keselarasan kurikulum SMK kompetensi keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dengan cara 1) Mengidentifikasi kompetensi lulusan SMK APHP yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan 2) Mengidentifikasi pola mekanisme penyesuaian kurikulum SMK APHP yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

KAJIAN LITERATUR

Kesesuaian merupakan hubungan atau konektivitas antara satu unsur dengan unsur yang lain atau hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain. Hubungan tersebut dilandasi oleh satu kesamaan tujuan, kesamaan konsep atau kesamaan pemahaman. Dalam pendidikan, kesesuaian dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain hubungan secara internal dan eksternal. Hubungan internal dalam pendidikan dapat dilihat dari hubungan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan.

Kesesuaian pendidikan dapat ditinjau dari hubungan antara pendidikan dan lembaga lain di luar lembaga pendidikan, seperti halnya hubungan antara pendidikan kejuruan dan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), masyarakat atau Pemerintah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep kesesuaian mempunyai berbagai makna atau tujuan. Namun, pada intinya kesesuaian dapat dimaknai sebagai sebuah hubungan, konektivitas, relasi, atau aktifitas yang saling berhubungan satu sama lain dengan prinsip dan tujuan yang sama. Terkait dengan kesesuaian program pendidikan dengan dunia kerja sejalan dengan filosofi *link and match* pendidikan kejuruan yang dikenal dengan Pendidikan Sistem Ganda yang digagas oleh Wardiman Djonegoro (1998)

Keselarasn pendidikan SMK dalam hal ini dibatasi pada kesesuaian antara kompetensi yang dipelajari di SMK dengan kebutuhan dunia kerja (DU/DI). Asumsuntanya, semakin terjadi kesesuaian semakin mudah lulusannya memperoleh pekerjaan. Kesesuaian pendidikan SMK dengan DU/DI diarahkan pada upaya peningkatan kompetensi lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI,

Berdasarkan uraian di atas, maka prinsip utama kesesuaian pendidikan yaitu adanya keterkaitan atau kesepadanan (*link and match*) antara pendidikan dan dunia kerja (DU/DI). Relevansi keduanya mampu meningkatkan kompetensi lulusan SMK sehingga mereka bekerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Kondisi dan realitas tersebut sejalan dengan pendapat Stevenson (2003) yaitu *“the purpose of vocational education is to meet the needs of industry, meaning that the ‘client’ or ‘customer’ is industry and that industrial standards for work activity should be used as the primary (even exclusive) basis for curricular statements and teaching”*.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, semua kegiatan utama yang tertuang dalam silabus pembelajaran mengacu pada hal-hal yang akan digunakan dalam pekerjaan. Kompetensi pendidikan dan pelatihan kejuruan yang tidak sesuai dengan tuntutan dunia kerja akan menimbulkan ketidaksesuaian pekerjaan lulusan (*miss-natch*). Akibatnya, hasil pendidikan tidak bermanfaat bagi pemakai lulusan. Oleh karena itu, kontribusi DU/DI sangat bermakna untuk meningkatkan kompetensi keahlian bagi calon lulusan SMK dan juga bagi guru produktif.

Membangun mitra kerja (*partnership*) antara SMK dan DU/DI merupakan sebuah keniscataan untuk menghasilkan lulusan yang berkompoten. Penulis berpendapat bahwa dalam melakukan kerjasama SMK dan DU/DI sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut 1) pola mekanisme pembelajaran di SMK didukung oleh pemerintah dan bimbingan profesional industri; 2) menjadikan kerjasama SMK dan industri menganit asas saling menguntungkan; 3) mendorong industri untuk berperan aktif dalam menyiapkan lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; dan 4) mendorong siswa SMK terlibat dalam pelatihan kerja nyata (*prakerin*)

Kebijakan peningkatan kualitas guru produktif melalui pendidikan dan pelatihan (*magang industri*) merupakan salah satu program yang esensial untuk mewujudkan visi SMK agar lulusannya mampu bekerja sesuai bidang keahliannya. Guru produktif yang tidak menguasai materi dan metode pembelajaran akan sulit mengajar siswanya dan berdampak pada tidak diperolehnya lulusan yang mempunyai kompetensi yang mumpuni. Sebaliknya, guru produktif yang menguasai materi (*teori-praktik*) dan metode pembelajaran diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang handal (Dir. PSMK, 2016b)

Sinkronisasi kurikulum dapat tercapai manakala kerjasama antara pihak industri dengan pihak sekolah terjalin secara intensif dan kondusif serta idealnya “saling menguntungkan” para pihak.. Namoaknya harapan tersebut tidak mudah diwujudkan karena secara faktual menunjuk kan bahwa pola penyelenggaraan SMK di Indonesia masih berorientasi pada *supplay driven*. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ace Suryadi (2010) di mana jenis program keahlian, materi pendidikan, cara mengajar, media pembelajaran, evaluasi dan sertifikasi lebih dominan ditentukan oleh Pemerintah serta program pendidikan SMK kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan lapangan kerja.

Kurikulum SMK 2013

Penelitian ini mengkaji kurikulum SMK Tahun 2013 (K-13). Pengertian K-13 sebagaimana dikemukakan Mulyadi Ade (2014) adalah kurikulum yang menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat berikutnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Depdiknas,2003).

Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, *skill*, dan pendidikan berkarakter, sehingga siswa dituntut untuk mampu memahami bahan ajar (materi) dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pro aktif dalam berdiskusi dan melakukan presentasi serta memiliki sopan santun (*etika*) dan disiplin tinggi. Kurikulum 2013 menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang diimplementasikan sejak tahun 2006. Dalam

Kurikulum 2013, semua mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik pada semua jenis, satuan, dan jenjang pendidikan.

Khusus untuk SMK struktur kurikulum (Dir. PSMK, 2013) dikelompokkan dalam tiga kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran A, B, dan C. Kelompok mata pelajaran A berisi wawasan Nasionalisme, Kelompok mata pelajaran B berisi wawasan Kebangsaan dan Kelompok mata pelajaran C atau peminatan kejuruan terdiri atas kelompok mata pelajaran C1 (dasar bidang keahlian), C2 (dasar program keahlian), dan C3 (kompetensi keahlian).

Keselarasan kurikulum SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dalam penelitian ini meliputi keluasan dan kedalaman kompetensi yang diajarkan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja berdasarkan skema sertifikasi KKNI level II yang telah ditetapkan oleh BNSP dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah

Kurikulum 2013 memiliki karakteristik sebagai berikut a) Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran; b). Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang, kelas, dan mata pelajaran; c). Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik SMK, d). KI dan KD pada jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, namun pada jenjang pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual (kemampuan kognitif tinggi); e). Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (*organizing elements*) Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti; f). Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antarmata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal) diikat oleh kompetensi inti; g). Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut; dan h). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikembangkan dari setiap KD untuk masing-masing mata pelajaran di setiap kelas (Puskurbuk, 2013).

Kompetensi

Berdasarkan kurikulum SMK Tahun 2013 kompetensi dimaknai sebagai kemampuan yang merupakan perpaduan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) untuk melakukan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan” (Puskurbuk, 2013). Finch & Crunkilton dalam Mulyasa (2005) mengemukakan: “kompetensi diartikan sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugastugas yang sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu, dengan demikian terdapat hubungan antara tugas-tugas yang dipelajari peserta didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia usaha atau dunia industri. Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam penelitian ini yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yang bertujuan untuk perubahan tingkah laku yang meliputi kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan apresiasi sebagai perubahan perilakuyang dihasilkan dari proses belajar untuk dapat

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan tertentu dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia usaha (Dir.PSMK,2017).

Mengacu pada Skema Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) level II, kompetensi lebih berorientasi pada kecakapan yang mendukung pada jabatan tertentu, sesuai dengan ketetapan definisi "Standar KKNI adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional". Dengan demikian, definisi kompetensi dari manapun sumbernya akan tetap menunjukkan pada kemampuan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan (Perpres. No.8/2012; Kemenakertrans, 2016; Permenakertrans No. 5/2012)

Hasil penelitian Harjono Notodihardjo (1990) menunjukkan bahwa pengguna kompetensi mengharapkan adanya kompetensi akademik yang relevan dengan 06 JPE DP, Desember 2010 dalam hal pengalaman praktek. kerja. Kompetensi menjadi hal penting dalam dunia kerja karena adanya anggapan "karakteristik dasar seseorang ada hubungan sebab-akibatnya dengan prestasi kerja yang luar biasa atau dengan efektivitas kerja" (Spencer & Spencer, 1993). Marshal Sashkin dan Kisser (1993) mengemukakan" Jika seorang lulusan memasuki dunia kerja maka kompetensi yang diharapkan adalah kompetensi yang mampu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, dalam hal ini kinerja perusahaan dalam era globalisasi mengacu pada produktivitas untuk dapat memenangkan persaingan".

Dunia Kerja

Dunia kerja merupakan dunia tempat sekumpulan pekerja dalam melakukan suatu aktivitas kerja, baik di dalam perusahaan maupun organisasi mengharapkan seluruh karyawannya memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan. Di Indonesia, hal-hal terkait dengan tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU.No.13/2003). Setiap perusahaan pada dasarnya menginginkan dan menuntut agar seluruh karyawan selalu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Salah satu faktor penentu keberhasilan kerja yaitu perusahaan memiliki karyawan yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Artinya, bahwa karyawan memiliki kompetensi keahlian di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan kerja maka harus ada kesesuaian antara kompetensi pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.

Karyawan merupakan salah satu aset utama dalam suatu perusahaan yang saat ini semakin diakui keberadaannya.Hal ini dikarenakan penentu dari sebuah keberhasilan kerja dalam pencapaian suatu tujuan perusahaan salah satunya yaitu perusahaan memiliki karyawan yang produktif. Perusahaan selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik bagi karyawannya agar tetap tinggal di perusahaan tempat ia bekerja. Salah satunya berupa pembayaran upah, penghargaan atau peluang dalam bekerja maupun rasa aman dalam lingkungan perusahaan. Sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi karyawan diperlukan sebuah "reward" yang biasanya berbentuk penambahan upah/gaji di akhir tahun.

Menurut Stephen Robbins (2003) bahwa sebagai karyawan menginginkan suatu kepuasan kerja yang diindikasikan dalam bentuk sikap individu secara umum terhadap hasil kerjanya.. Secara keseluruhan kepuasan kerja merupakan salah satu aspek yang penting dalam pekerjaan. Ketidakuasan kerja yang dimiliki karyawan akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang terjadi dalam diri karyawan maupun perusahaan tempat mereka bekerja. Akibatnya, perusahaan terpaksa menanggung beban biaya yang cukup tinggi apabila kepuasan kerja karyawan tidak diperhatikannya. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan adanya karyawan yang berhenti kerja, sering kali absen (bolos) kerja dan

beberapa masalah pelanggaran disiplin yang dapat menyebabkan biaya pengeluaran yang cukup tinggi dalam perusahaan dan menurunnya prestasi kerja dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ketenagakerjaan

METODE

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif yaitu metode meta-analisis untuk memetakan unit-unit kompetensi dalam Skema Sertifikasi KKN level II pada Kompetensi Keahlian APHP yang diadopsi ke dalam Kurikulum dan selanjutnya dituangkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (RPP, Silabus, dan Lembar Kerja/Praktik). Pendekatan kualitatif menggunakan metode kasus untuk mendeskripsikan penyesuaian kurikulum pada tingkat mata pelajaran, dan/atau pada tingkat KI-KD masing-masing mata pelajaran, pelaksanaan prakerin, proses sertifikasi, dan pengembangan kewirausahaan siswa.

Variabel penelitian ini meliputi a) kesesuaian kurikulum SMK Pertanian Bidang Agribisnis/Agrotrmplogi, Kompetensi keahlian APHP yang dibutuhkan DU/DI, dan b) Kerjasama SMK dengan DU/DI dalam upaya meningkatkan kompetensi pendidik dan lulusan SMK. Adapun indikator kesesuaian/keselarasan kurikulum meliputi 1) kesesuaian dalam jenis kompetensi dan kedalaman tingkat kompetensi berbasis Skema Sertifikasi KKN level II, 2) pembelajaran (perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar).

Populasi penelitian ini meliputi seluruh SMK yang menyelenggarakan Kompetensi Keahlian APHP di Indonesia. Adapun SMK yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya 4 (empat) yang berlokasi di satu kota dan tiga kabupaten. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* (sampling bertujuan). Sekolah sampel terdiri atas SMKN PP Tanjungsari-Sumedang; SMKN 2 Temanggung; SMKN 5 Jember; SMKN PP Banjarbaru-Banjarmasin; dan SMKN Terpadu Pekanbaru/

Responden penelitian meliputi wakil kepala sekolah (wakasek) bidang hubungan masyarakat (humas), wakasek bidang kurikulum, guru produktif (kelompok mata pelajaran peminatan kejuruan), pembimbing prakerin/pkl, dan instruktur/pembimbing prakerin di DU/DI.

Data penelitian ini berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui metode *desk study* (studi dokumen) dari berbagai sumber baik berupa dokumen internal/eksternal dunia usaha/dunia industri (DUDI), peraturan perundang-undangan yang relevan, laporan hasil studi, data statistik pendidikan khususnya SMK Pertanian, dan studi pustaka. Hasil analisis data diverifikasi di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. sesuai dengan jumlah sampel penelitian. Verifikasi ini dilakukan dengan cara diskusi kelompok terpumpun (DKT/FGD).

Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dibuat dalam bentuk persentase untuk melihat berapa jumlah SMK Pertanian yang telah memiliki kurikulum selaras dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja. Data kualitatif dianalisis dengan cara menginventarisasi, mengelompokkan data, mengklasi-fikasi, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Kurikulum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengadopsian tigapuluh unit kompetensi umum/inti dan pilihan tersebut tersebar pada berbagai KI-KD dari setiap mata pelajaran kelompok C2 (Dasar Program Keahlian), dan mata pelajaran kelompok C3 (Kompetensi Keahlian). Dengan mencermati hasil pemetaan sebaran pengadopsian tersebut (Tabel 1) maka dapat dinyatakan bahwa Kurikulum yang digunakan pada

Kompetensi Keahlian APHP telah mengacu pada KKNI, dalam hal ini Skema Sertifikasi KKNI level II untuk Kompetensi Keahlian APHP (Dir.PSMK,2017)

Kesesuaian Kurikulum Kompetensi Keahlian APHP menunjukkan bahwa pengadopsian Skema Sertifikasi KKNI level II dalam Kurikulum 2013 menunjukkan bahwa (a) Dari 17 unit kompetensi Umum/Inti dan 13 unit kompetensi pilihan yang terdapat dalam Skema Sertifikasi KKNI level II pada Kompetensi Keahlian APHP telah diadopsi ke dalam Kurikulum yang digunakan pada pembelajaran kompetensi Keahlian APHP; (b) Pengadopsian tigapuluh unit kompetensi umum/inti dan pilihan tersebut tersebar pada berbagai KI-KD dari setiap mata pelajaran kelompok C2 (Dasar Program Keahlian), dan mata pelajaran kelompok C3 (Kompetensi Keahlian); (c) Tidak perlu dilakukan penambahan KI-KD, apalagi mata pelajaran baru, dalam struktur Kurikulum kompetensi keahlian APHP, karena kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan DU/DI sebagaimana tertuang dalam Skema Sertifikasi KKNI level II (Kompetensi Keahlian APHP) sudah diadopsi ke dalam Kurikulum. Dengan demikian, dalam konteks kesesuaian, Kurikulum yang digunakan pada Kompetensi Keahlian APHP telah sesuai dengan kebutuhan DU/DI; (d) Unit-unit kompetensi dalam Skema Sertifikasi KKNI yang telah diadopsi ke dalam Kurikulum telah dituangkan pula ke dalam RPP, Silabus, dan Lembar Kerja/Praktik. Dengan demikian sampai tingkat perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran telah mengacu pada Skema Sertifikasi KKNI, yang berarti sesuai pula dengan kebutuhan DU/DI; (e) .Dalam hal keterlaksanaan kurikulum, hampir semua sekolah sampel tidak dapat melaksanakan (mengaplikasikan) pembelajaran seluruh KI-KD yang tertuang dalam Kurikulum. Hal ini terjadi khususnya pada struktur KI-KD pembelajaran keterampilan (KI-4) yang terkait dengan pengolahan komoditas hasil tanaman keras (kelapa, kelapa sawit, karet); kemudian dalam mata pelajaran Produksi Pengolahan Komoditas Perkebunan dan Herbal. Hal ini dikarenakan tidak terdapat industri/pabrik yang mengolah komoditas hasil tanaman-tanaman keras yang ada di daerah ataupun wilayah sekitar lokasi sekolah sampel Akibatnya, sekolah tidak memiliki mitra kerja (DU/DI) sebagai mitra kerja pendukung pelaksanaan prakerin.

Lebih lanjut, beberapa KI-KD yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan DU/DI dalam hal (1) Kedalaman, Deskripsi KI-KI keterampilan (KI-4) yang mengarahkan siswa mampu menunjukkan umbi-umbian, buah dan sayuran segar untuk satuan produksi (mata pelajaran Produksi Pengolahan Hasil Nabati) dianggap masih kurang. Seharusnya dalam hal ini siswa juga diarahkan memiliki keterampilan mampu menganalisis, membuat kriteria, menerapkan dan mengevaluasi kondisi/kualitas komoditas-komoditas hasil pertanian tersebut; (2) Kurangnya jumlah jam tatap muka; Jumlah tatap muka pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran C2 (Dasar Program Keahlian) yang total hanya dialokasikan 12 jam per minggu (@45 menit) dinyatakan kurang untuk siswa dapat menguasai dengan baik kompetensi-kompetensi yang diajarkan, baik untuk persiapan mengikuti prakerin maupun masa-masa pertamakali jika bekerja di perusahaan. Hal ini dikarenakan pada masa awal prakerin dan jika nanti bekerja, siswa/lulusan tidak akan melakukan praktik langsung di bagian produksi/pengolahan, tetapi diawali dengan praktik penanganan bahan berupa pengamatan/pemeriksaan mutu bahan, sambil melakukan observasi proses produksi/pengolahan bahan.

Di samping itu, (a) penguasaan kompetensi dalam hal keamanan pangan (misal HACCP/*Hazard Analysis Critical Control Point*, dan ISO 22000 beserta turunannya) perlu ditambah lebih mendalam. Kalangan DU/DI menyatakan bahwa tuntutan konsumen (pasar) saat ini sudah “melampaui” kemampuan industri, dimana mereka menginginkan adanya kepraktisan namun tetap mengedepankan keamanan dalam menggunakan/ mengkonsumsi produk; (b) kemampuan kerja siswa dan lulusan di laboratorium, seperti teknik pengkalibrasian dan penggunaan peralatan pengujian mutu bahan, masih sangat kurang. Untuk

penggunaan alat sederhana siswa memang sudah banyak yang memahami, akan tetapi untuk peralatan yang modern belum terbiasa dan masih harus banyak belajar. Perkembangan terkini dalam proses produksi di DU/DI sudah semakin banyak memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya dibidang teknologi informatika (IT). Dapat dikatakan semua sistem kerja yang ada di DU/DI sudah terkomputerisasi, bahkan peralatan laboratorium yang digunakan DU/DI umumnya juga sudah menggunakan teknologi komputer/digital; (c) pemahaman tentang manajemen manufaktur dari hulu ke hilir saat ini semakin menjadi tuntutan bagi SDM di DU/DI. Dampak kemajuan (lompatan) teknologi informatika saat ini mengakibatkan operasional perusahaan ditangani oleh SDM yang terbatas. Masing-masing dituntut tidak hanya menguasai kompetensi yang menjadi spesialisasinya saja, tetapi setidaknya memahami kompetensi-kompetensi lain terkait yang dibutuhkan untuk berjalan lancarnya operasional perusahaan. Siswa juga perlu diajarkan beberapa *softskills* dalam hal kemampuan komunikasi (termasuk dalam Bahasa Inggris atau asing lainnya) dan leadership (tanggung jawab, disiplin waktu, dan tangguh/gigih dalam bekerja), karena lulusan juga memiliki peluang untuk berkarir menjadi pimpinan di perusahaan. Meskipun kesesuaian Kurikulum SMK Bidang Agrobisnis/Agroteknologi kompetensi keahlian APH namun masih harus dilanjutkan dengan proses pembelajaran teori dan praktik yang selaras dan sepadan (link and match) dengan ketercapaian kompetensi yang diperlukan dunia kerja melalui pengalaman lapangan atau praktik kerja industri (prakerin). Idealnya, sluruh calon lulusan SMK memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama selama pelaksanaan prakerin di dunia kerja.

Dalam konteks kesesuaian, dapat dikatakan Kurikulum yang digunakan pada Kompetensi Keahlian APHP telah sesuai dengan kubutuhan DU/DI. Dari hasil pemetaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penyesuaian Kurikulum dengan kebutuhan DU/DI untuk Kompetensi Keahlian APHP tidak perlu dilakukan penambahan KI-KD baru, apalagi mata pelajaran baru, karena kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan DU/DI sebagaimana tertuang dalam Skema Sertifikasi KKNi level II untuk Kompetensi Keahlian APHP sudah diadopsi ke dalam Kurikulum.

Setelah pengadopsian Skema Sertifikasi KKNi level II ke dalam Kurikulum, langkah berikutnya dalam konteks kesesuaian yaitu dituangkan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran (RPP). Hal tersebut dapat dicermati pada RPP dan Silabus yang disusun dan digunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran, baik teori/pengetahuan (KI-3) maupun praktik/keterampilan (KI-4) untuk setiap mata pelajaran pada kelompok C2 (Dasar Program Keahlian) dan kelompok C3 (Kompetensi Keahlian). Hasil analisis konten terhadap beberapa sampel RPP, Silabus, dan Lembar Kerja/Praktik dari mata pelajaran tersebut menunjukkan bahwa unit-unit kompetensi dalam Skema Sertifikasi KKNi telah dituangkan dalam RPP, Silabus, dan Lembar Kerja/Praktik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran telah mengacu pada Skema Sertifikasi KKNi.level II (BNSP, 2017)

Tabel 1. Adopsi Skema Sertifikasi KKNi Level II Kompetensi Keahlian APHP dan Agroindustri

Kompetensi Umum dan Inti		Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGROINDUSTRI
THP.OO01.006.01	Mengikuti Prosedur kerja menjaga praktik pengolahan yang baik (GMP)	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 11	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 11
THP,OO01.007,01	Mengikuti Prosedur Menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 3 dan 6	Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 2 dan 6

Kompetensi Umum dan Inti		Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGROINDUSTRI
THP,OO01.009,01	Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Mutu	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 3 Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 1 dan 11 Keamanan Pangan, Penyimpan-an dan Penggudangan, KI 1,2 dan 5	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 3 Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 1 dan 11 Produksi Hasil Nabati, KI 4,20, dan 21 Produksi Hasil Hewani, KI 4,21 dan 22 Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 15 dan16 Keamanan Pangan dan Sistem Jaminan Mutu, KI 1,2,31,32, dan 34
THP,OO01,012,01	Membersihkan dan Sanitasi Peralatan	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 8 dan 10 Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 6	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 8 dan 10 Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 6 Produksi Hasil Nabati, KI 4 Produksi Hasil Hewani, KI 4
THP ,FS02,016,01	Mengikuti Prosedur Kerja Menjaga Keamanan Pangan	Keamanan Pangan, Penyimpanan dan Penggudangan, KI 1,3,4, dan 5	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 12 Produksi Hasil Nabati, KI 5,20, dan 21 Produksi Hasil Hewani, KI 5,21, dan 22 Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 15 dan 16 Keamanan Pangan dan Sistem Jaminan Mutu, KI 1,2,31,32,34, 35, dan 36
THP,ID02.018,01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Curai	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 17 dan 21	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Hasil Nabati, KI 5,9, dan 10 Produksi Hasil Hewani, KI 9
THP,ID02,020,01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Sayuran Segar	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 6	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 7
THP,ID02,022,01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Buah Segar	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 2	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Hasil Nabati, KI 6
THP,ID02,023,01	Mengidentifikasi Bahan/Komoditas Hasil Ternak	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Hewani, KI 1	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 2 Produksi Pengolahan Hasil Hewani, KI 6

Kompetensi Umum dan Inti		Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGROINDUSTRI
THP,HD02,029,01	Memilah dan Membersihkan	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 6	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 7 Penyimpanan dan Penggudangan, KI 22
THP.DR02,032,01	Mengoperasikan Proses Pengeringan	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 3	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 3 Penyimpanan dan Penggudangan, KI 22
THP,PK02,046,01	Mengoperasikan Proses Pengemasan	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 8 Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 9 Produksi Pengolahan Hasil Hewani, KI 7	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 8 Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 9 Produksi Hasil Nabati, KI 26 Produksi Hasil Hewani, KI 27 Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 21 Produk Kreatif dan Kewirausahaan, KI 4
THP,ST02,051 ,01	Mengoperasikan Proses Penyimpanan	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 9 dan 10 Keamanan Pangan, Penyimpanan dan Penggudangan, KI 6,7, 10,13, dan 14	Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, KI 9 dan 10 Penyimpanan dan Penggudangan, KI 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14, dan 18
THP.ZR02,059,01	Melakukan Proses Pemotongan	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 4,15, dan 23	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 1
THP,ZR02.063.01	Mengoperasikan Proses Grinding	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 1 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 19 dan 23	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 1
THP,EX02,064,01	Melakukan Proses Ekstraksi Padat-Cair	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 1	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 1
THP,FT02,069,01	Mengoperasikan Proses Fermentasi	Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 7 Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 8	Dasar Pengendalian Mutu Hasil Pertanian, KI 7
THP,OO03,08101	Melakukan Proses Pencampuran Bahan Adonan	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 20	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
THP,OO03,082,01	Mengoperasikan Proses Pembentukan Adonan	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 20	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
THP,OO03,083,01	Melakukan Proses Pengembangan Akhir	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 20	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 5 dan 6

Kompetensi Umum dan Inti		Teradopsi dalam Mata Pelajaran dan KI-KD (KI-3 dan KI-4)	
Kode Unit	Judul Unit	APHP	AGROINDUSTRI
	dan Pemanggangan Roti		
THP.OO03.084.01	Melakukan Proses Produksi Roti	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 20	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
THP.OO03.087.01	Melakukan Proses Membuat Susu Kedelai	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 24	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
THP.OO03.088.01	Memproduksi Nata de Coco	Produksi Pengolahan Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 3	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
THP.OO03.090.01	Memproduksi Asinan Sayuran	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 9	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 6
THP.OO03.092.01	Melakukan produksi telur asin	Produksi Pengolahan Hasil Hewani, KI 3,6	Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, KI 7
THP.OO03.095.01	Memproduksi Selai Buah (Jam)	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 5	Produksi Hasil Nabati, KI 6
THP.OO03.096.01	Melakukan Proses Penghancuran	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 20,24	Produksi Hasil Hewani, KI 8 Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 5 dan 7
THP.OO03.097.01	Melakukan Proses Produksi Tepung	Produksi Pengolahan Hasil Nabati, KI 16,20	Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 5
THP.OO03.100.01	Membuat Laporan Teknis dan Keuangan Bisnis Mandiri	Produk Kreatif dan Kewirausahaan, KI 20	Produksi Hasil Nabati, KI 29 Produksi Hasil Hewani, KI 30 Produksi Komoditas Perkebunan dan Herbal, KI 23 Produk Kreatif dan Kewirausahaan, KI 20,22,24, dan 27

Sumber: Hasil pengolahan data (2018)

Dalam struktur kurikulum, ditemukan hampir semua sekolah sampel tidak dapat melaksanakan (mengaplikasikan) pembelajaran untuk seluruh KI-KD yang tertuang dalam Kurikulum. Hal ini terjadi pada mata pelajaran Produksi Pengolahan Komoditas Perkebunan dan Herbal. Dalam struktur KI-KD mata pelajaran tersebut, KI-KD yang terkait dengan pembelajaran kompetensi keterampilan (KI-4) pengolahan komoditas hasil tanaman keras (kelapa, kelapa sawit, karet) tidak dapat dilaksanakan. Penyebabnya yaitu tidak terdapat industri/pabrik yang mengolah komoditas hasil tanaman-tanaman keras tersebut, di daerah ataupun wilayah sekitar domisili sekolah. Dengan demikian sekolah tidak bisa mendapatkan DU/DI untuk dijadikan mitra pendukung keterlaksanaan pembelajaran, baik untuk pembelajaran praktik dasar maupun untuk tahapan prakerin bagi siswa.

Meskipun tidak memerlukan adanya penambahan KI-KD dalam struktur Kurikulumnya, penelitian ini mendapatkan beberapa KI-KD yang kedalaman atau deskripsi, dan jumlah jam tatap muka pembelajarannya akan menghasilkan kompetensi lulusan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan DU/DI. Merujuk kepada deskripsi KI-KD pada mata pelajaran Produksi Pengolahan Hasil Nabati yang terkait dengan pengetahuan (KI-3) tentang identifikasi umbi-umbian, buah dan sayuran segar untuk satuan produksi, siswa hanya diarahkan memiliki kompetensi keterampilan (KI-4) mampu menunjukkan umbi-umbian, buah dan sayuran segar untuk satuan produksi. Hal tersebut dianggap masih kurang apabila hanya dapat menunjukkan saja. Seharusnya dalam hal ini deskripsi KI-KD secara eksplisit menyatakan siswa juga harus memiliki kompetensi mampu menganalisis, membuat kriteria, menerapkan dan mengevaluasi kondisi/kualitas komoditas umbi-umbian, buah dan sayuran.

Dalam Struktur Kurikulum tersebut ketiga mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok C2 (dasar program keahlian) masing-masing dialokasikan 3 jam/minggu untuk mata pelajaran Dasar Penanganan Bahan Hasil Pertanian, 5 jam/minggu untuk mata pelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian, dan 4 jam/minggu untuk mata pelajaran Dasar Pengendalian Mutu Hasil pertanian. Jumlah tatap muka pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran C2 yang total hanya dialokasikan 12 jam per minggu (@45 menit) oleh kalangan sekolah dinyatakan kurang. Sebab untuk keperluan persiapan mengikuti prakerin di perusahaan saja, penguasaan kompetensi-kompetensi yang dipelajari dalam mata pelajaran kelompok C2 ini menjadi semacam prasyarat pertama. Hal ini dikarenakan pada masa awal prakerin siswa tidak akan melakukan praktik langsung di bagian produksi/pengolahan, tetapi diawali dengan praktik penanganan bahan berupa pengamatan/pemeriksaan mutu bahan, sambil melakukan observasi proses produksi/pengolahan bahan.

Menurut kalangan DU/DI demikian juga yang terjadi ketika lulusan direkrut oleh perusahaan, masa-masa pertamakali bekerja akan dilakukan di bagian penanganan bahan terlebih dahulu. Pada prinsipnya hal tersebut untuk menghindari atau meminimalisir resiko terjadinya kesalahan dalam proses produksi. Kalangan DU/DI berpendapat bahwa tuntutan konsumen (pasar) saat ini sudah “melampaui” kemampuan industri, dimana mereka menginginkan adanya kepraktisan namun tetap mengedepankan keamanan dalam menggunakan/mengonsumsi produk. Berdasarkan perkembangan kondisi inilah, DU/DI menyatakan penguasaan kompetensi dalam hal keamanan pangan perlu ditambah lebih mendalam. Terkait dengan hal tersebut, sesuai perkembangan yang dihadapi oleh DU/DI belakangan ini, pengetahuan-pengetahuan terkini tentang standar-standar kinerja yang saat ini digunakan/diacu oleh DU/DI seperti HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*), dan ISO 22000 beserta turunannya untuk berbagai jenis pangan, harus diajarkan kepada siswa.

Kemampuan kerja siswa di laboratorium, seperti teknik pengkalibrasian dan penggunaan peralatan pengujian mutu bahan, masih sangat kurang. Untuk penggunaan alat sederhana siswa memang sudah banyak yang memahami, akan tetapi untuk peralatan yang modern belum terbiasa dan masih harus banyak belajar. Perkembangan terkini dalam proses produksi di DU/DI sudah semakin banyak memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya dibidang teknologi informatika (IT). Dapat dikatakan semua sistem kerja yang ada di DU/DI sudah terkomputerisasi, bahkan peralatan laboratorium yang digunakan DU/DI umumnya juga sudah menggunakan teknologi komputer/digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi lulusan SMK APHP dalam hal Teknologi Informatika (IT), apalagi jika mengingat hampir semua SMK masih menggunakan teknik (cara) dan peralatan manual dalam pembelajaran praktiknya.

Selain untuk kompetensi *hardskills* sebagaimana tersebut di atas, siswa juga perlu diberikan beberapa *softskills* sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di DU/DI saat ini. Pemahaman tentang manajemen manufaktur dari hulu ke hilir saat ini semakin menjadi tuntutan bagi SDM di DU/DI. Dampak kemajuan (lompatan) teknologi informatika saat ini mengakibatkan di satu sisi DU/DI harus dijalankan oleh organisasi SDM yang semakin ramping, tetapi di sisi lain masing-masing individu SDM tersebut juga dituntut minimal harus memahami kompetensi-kompetensi lain yang terkait dengan kompetensi pokok/utama yang benar-benar “dikuasanya”. Kondisi ini akan tampak jelas pada DU/DI yang tergolong ke dalam skala UKM, dimana operasional perusahaan ditangani oleh SDM yang terbatas. Dengan demikian, masing-masing dituntut tidak hanya menguasai kompetensi yang menjadi spesialisasinya saja, tetapi juga kompetensi-kompetensi lain terkait yang dibutuhkan untuk berjalan lancarnya operasional perusahaan. Selain itu *Soft skills* lain dalam hal kemampuan komunikasi (termasuk dalam Bahasa Inggris atau asing lainnya) dan leadership (tanggung jawab, disiplin waktu, dan

tangguh/gigih dalam bekerja) juga perlu diajarkan, karena lulusan juga memiliki peluang untuk berkarir menjadi pimpinan di perusahaan.

Mekanisme Penyelarasan Kurikulum

Secara formal, dalam penelitian ini tidak menemukan pola mekanisme penyelarasan kurikulum yang telah dilakukan SMK dengan DU/DI. Namun, secara tidak formal penyelarasan kurikulum telah dilakukan oleh masing-masing sekolah sampel dengan cara memberdayakan alumni yang bekerja di institusi pasangannya (DU/DI). Kontribusi alumni yang tersebar di berbagai perusahaan dalam skala lokal, nasional, hingga multinasional, dan/atau bahkan yang sukses dalam berwirausaha sangat mendukung kualitas lulusan SMK. Dalam kasus seperti ini ikatan alumni tidak saja berperan dalam penyelarasan kurikulum, namun juga berkontribusi dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah. Bentuk-bentuk kontribusi ikatan alumni tersebut antara lain memfasilitasi kunjungan industri, prakerin siswa, program magang guru produktif, guru tamu, pemberian beasiswa..

Penyelarasan kurikulum atau sinkronisasi dengan mitra DU/DI, dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada waktu menjelang tahun ajaran baru dan menjelang ulangan kenaikan kelas. Dalam konteks ini, pihak DU/DI diminta untuk menyampaikan kompetensi-kompetensi apa saja yang *up to date* mereka butuhkan. Mekanisme yang dilakukan sekolah yaitu dengan cara mengirimkan format ke pihak DU/DI untuk diisi terkait dengan kompetensi apa saja yang *up to date* mereka butuhkan. Setelah itu, dilakukan pembahasan bersama dengan para pemangku kepentingan. Hasil sinkronisasi digunakan sebagai bahan untuk pengembangan kurikulum. Selain melalui kegiatan sinkronisasi, upaya penyelarasan kurikulum juga dilakukan pada waktu monev pelaksanaan prakerin bersama DU/DI. Hasil monev tersebut dijadikan bahan masukan (*feedback*) untuk pengembangan kurikulum. dan pada akhirnya sebagai bahan pengayaan siswa sebelum melakukan prakerin.

PENUTUP

Mengacu pada hasil dan pembahasan penelitian disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Kurikulum dan pelaksanaan kurikulum (penyusunan RPP, Silabus, dan pelaksanaan pembelajaran) pada Kompetensi Keahlian APHP dan Kompetensi Keahlian Agroindustri pada Skema Sertifikasi KKN Level II pada Kompetensi Keahlian APHP, yang telah disahkan bersama oleh BNSP dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada November 2017.

Kedua, penyelarasan kurikulum SMK Pertanian kompetensi keahlian APHP berbasis kebutuhan kompetensi dunia kerja, tidak perlu melakukan penambahan mata pelajaran atau bahkan penambahan unit KI/KD dalam kurikulum. Namun demikian, ditemukan beberapa hal: (a) Materi pengetahuan (KI-3) pada mata pelajaran Keamanan Pangan, Penyimpanan dan Penggudangan, khususnya terkait standar keamanan pangan, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan yang dihadapi oleh DU/DI; (b) Kedalaman kompetensi keterampilan yang diajarkan pada KI-4 mata pelajaran Produksi Pengolahan Hasil Nabati, dalam hal ini kompetensi menunjukkan kesegaran berbagai komoditas hasil pertanian sebagai bahan baku produksi, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan DU/DI. Keterampilan yang dituntut DU/DI saat ini tidak hanya sekedar menunjukkan saja, tetapi juga mampu mengevaluasi, menyusun kriteria, dan mengklasifikasi tingkat kesegaran bahan bakut; (c) Kurangnya jumlah jam tatap muka untuk pembelajaran semua mata

pelajaran kelompok Dasar Program Keahlian (C2), dan (d) *Soft skills* lulusan SMK dalam hal kemampuan komunikasi dan kepemimpinan (*leadership*) pada umumnya lemah.

Ketiga, belum semua SMK penyelenggara Kompetensi Keahlian APHP menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai/selaras dengan kebutuhan DU/DI. Hal ini antara lain disebabkan (a) Kekurangan sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran, terutama untuk pembelajaran praktik; (b) Keterbatasan guru, dalam hal ini guru mata pelajaran kelompok C3, baik jumlah maupun kompetensinya; (c) Kesulitan mendapatkan mitra DU/DI, khususnya bagi SMK yang kompetensi keahliannya belum lama beroperasi, dan (e) Belum memiliki tempat uji kompetensi (TUK) yang mendapat lisensi sebagai LSP-P1 dari BNSP.

Kempat, penyelarasan kurikulum dilakukan dengan melibatkan mitra DU/DI, Komite Sekolah, dan Ikatan Alumni, dan dilakukan pada saat kegiatan (1) Sinkronisasi; menjelang kenaikan kelas, dan menjelang tahun ajaran baru, dan (2) Monitoring dan Evaluasi bersama dengan mitra DU/DI terhadap program prakerin.

Kelima, sekolah sudah memberikan porsi jam belajar yang cukup untuk materi kewirausahaan. Bagi sekolah yang telah memiliki kegiatan *teaching factory* (TEFA), sekolah membuat program magang bagi siswa yang berminat untuk belajar kewirausahaan di TEFA milik sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Persentase Penduduk Usia ≥ 15 Tahun yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Data November 2013a, Mei dan November 2014 dan 2015
- Badan Pusat Statistik, Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia ≥ 15 Tahun Menurut Tingkat Pendidikan November 2013b, Mei dan November 2014 dan 2015, dan Mei 2016
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (2017). *Skema Sertifikasi KKNI Level II pada Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian*. Jakarta: BNSP.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2016). *Grand Design Pendidikan Kejuruan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Djojionegoro, Wardiman. (1998). *Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Jakarta. PT Jayakarta Agung Offset.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2013). *Spektrum. Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan*
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2016a). *Paparan Kepala Sub. Direktorat P2SMK: Keselarasan Kurikulum 2013 dengan kebutuhan Duna Kerja* Jakarta: Dikmenjnr
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2016b). *Pengembangann Bidang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan*, Jakarta: Dikmenjnr
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. (2017). *Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar SMK/MAK Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian*. Jakarta: Dit. PSMK, DitJen Dikdasmen, Kemendikbud.
- Effendi, M. (2016). SMK Bisa Hebat. *Majalah SMK*, Edisi ke-II 2016.
- Gunadi, G., Usman, T., & Nugraha, B. S. (2014). Identifikasi Kompetensi SMK Program Studi Otomotif dalam Rangka Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 22(2), 155-162.

- Jalal, F. (2015). *Bonus Demografi: Berkah atau Bencana, Makalah disampaikan pada Dialog Bonus Demografi*, Jakarta: DDI.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2016). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik. (2016). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia*
- Mulyadi, A. (2014). *Efektivitas praktik kerja industri sesuai dengan tuntutan dunia kerja*, Skripsi, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika Fakultas Teknik, UNY
- Mulyasa. (2005). *Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Notodihardjo, H. (1990). *Pendidikan Tinggi Dan Tenaga Kerja Tingkat Tinggi di Indonesia*. Jakarta: UI-Press,
- Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2013). *Struktur Kurikulum Tahun 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri*. Jakarta: Kemendikbud
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi dalam www.kemenakertrans.go.id, dikutip 04 April 2018
- Robins, S. (2003) *Organizational Behaviour*, Third Edition (Perilaku Organisasi): Alih Bahasa Drs. Benyamin Malan. Jakarta: PT Macan Jaya Cemerlang
- Stevenson. J. (ed). (2003). *Developing Vocational Expertise. Principles and issues in Vocational Education*. Australia: Allen & Unwin.
- Suryadi, A. (2010). *Permasalahan dan Alternatif Kebijakan Peningkatan Relevansi Pendidikan. Studi Relevansi pendidikan Kerjasama UPI bekerjasama dengan Balitbang Kemendiknas*. Jakarta: UPI bekerjasama dengan Balitbang Kemendiknas.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work*. Canada: John Wiley & Son.
- Slamet, P. H. (2016). Kontribusi Kebijakan Peningkatan Jumlah Siswa Smk terhadap Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, (3), 84558.
- Sashkin, M., & Kiser, K. J. (1993). *Putting total quality management to work: what TQM means, how to use it, & how to sustain it over the long run*. Berrett-Koehler Publishers.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
- Widiaty, I. (2013). Relevansi kurikulum SMK berbasis industri kreatif dengan metode extrapolation and the econometric approach. *Innovation of Vocational Technology Education*, 9(1), 29-42.
- Widiyanto, W. (2010). Strategi pengembangan kurikulum berbasis kompetensi DUDI untuk SMK. *Dinamika Pendidikan*, 5(2), 103 – 116
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.